

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terorisme bukanlah menjadi suatu hal yang baru atau asing bagi masyarakat internasional. Kemunculan kelompok teroris besar seperti *Islamic State* (IS) dan Al-Qaeda di Irak dan Suriah membuat banyak kelompok-kelompok teroris kecil yang bermunculan, seperti salah satunya kelompok teroris Abu Sayyaf yang menjadi kelompok separatis terkecil dan kemungkinan paling berbahaya.¹ Hal ini menimbulkan beberapa perubahan dalam pola pergerakan kelompok terorisme yang cukup signifikan dan dinilai sangat membahayakan bagi keamanan suatu negara. Perubahan pola aktivitas terorisme global ini semakin memperkuat peran penting dari organisasi-organisasi regional maupun internasional dalam memerangi aksi terorisme.

Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik tidak menentu, rasa tidak aman serta membuat masyarakat menjadi tidak percaya terhadap kemampuan pemerintah.² Aksi terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi teror dapat dilakukan di mana saja dan terhadap siapa saja. Maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai *psy-war*. Sejauh ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Terorisme.

¹ Widyia, M. C. 2019. Peran Penting ASEAN dalam Menghadapi Perubahan Lanskap Terorisme. Masyarakat ASEAN, 21(Kemitraan), 16–19

² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 1371

Kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu sasaran bagi berkembangnya kelompok terorisme Abu Sayyaf. Salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi incaran dari kelompok terorisme ini adalah Filipina. Pada tahun 2009 terjadi upaya perebutan Kota Marawi di Filipina oleh kelompok pengikut Abu Sayyaf merupakan indikasi kuat bagaimana kelompok teroris ini berusaha menjadikan wilayah Filipina sebagai satelit *Islamic State*. Negara Filipina yang merupakan negara kepulauan mengakibatkan Filipina hanya memiliki hanya sedikit luas wilayah daratan, yaitu mencapai 30.000 km persegi dan juga tidak memiliki perbatasan darat dan akses keluar masuk di Filipina didominasi oleh jalur maritim.³ Oleh sebab itu, pengawasan perbatasan dan pengamanan wilayah maritim menjadi dua hal yang sangat penting dan menjadi tantangan tersendiri dalam penanggulangan terorisme di Filipina.

Kelompok teroris Abu Sayyaf atau *Abu Sayyaf Group* yang juga dikenal sebagai Negara Islam Irak dan Suriah – Provinsi Filipina, atau dikenal sebagai *Al Harakat Al Islamiyya*, adalah sebuah kelompok separatis yang terdiri dari milisi yang berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina, antara lain Jolo, Basilan, dan Mindanao.⁴ Kelompok teroris Abu Sayyaf merupakan sebuah kelompok militan yang beroperasi di Filipina Selatan dan mempromosikan pendirian sebagai suatu negara Islam yang merdeka di Mindanao dan Kepulauan Sulu, Filipina Selatan.

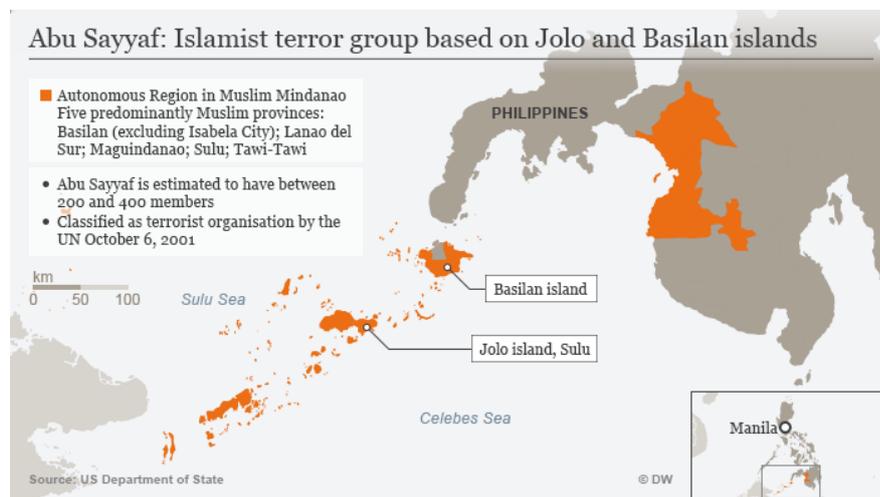
³ Mendoza, L. R. 2014. *Transportation Security in the Philippines 6th APEC Transportation Ministerial Meeting*. Diakses dari <http://www.apec-tptwg.org.cn/.../Transportation%20Security%20Philippines> pada 08 September 2019

⁴ Ressa, Maria A. T.T. “*Senior Abu Sayyaf Leader Swears Oath to ISIS*.”. diakses dari <https://www.rappler.com/nation/65199-abu-sayyaf-leader-oath-isis> pada 08 September 2020

Kelompok teroris Abu Sayyaf terlibat dalam berbagai tindak kekerasan, seperti pemboman, pembunuhan, penculikan dan penyanderaan maupun pemerasan.

Abu Sayyaf sendiri adalah seorang *mujahidin* di Afghanistan yang berperang melawan Uni Soviet pada era 1980-an. Abu Sayyaf memiliki arti bapak ahli pedang dalam bahasa Arab dan Abu Sayyaf memiliki banyak anak buah dalam pertempuran tersebut. Belakangan, nama Abu Sayyaf dipinjam sekelompok orang saat mereka memisahkan diri dari kelompok separatis Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) di Filipina pada 1991. Kelompok ini tidak hanya ingin mewujudkan Mindanao yang merdeka, tapi juga negara Islam di kawasan tersebut.⁵ Sejak itu, Abu Sayyaf gencar memperjuangkan tujuan tersebut dengan memerangi aparat Filipina yang dalam kasus ini merupakan ancaman bagi *state*.

Gambar 1.1 Area Teror Kelompok Teroris Abu Sayyaf



Sumber: Deutsche Welle⁶

⁵ BBC News Indonesia. 2016. Lima hal tentang kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160411_dunia_lima_hal_abu_sayyaf pada 10 Maret 2020

⁶ Deutsche Welle. T.T. Area Teror Kelompok Teroris Abu Sayyaf. Diakses dari www.dw.com/image/19178900_303.png pada 10 Maret 2020

Filipina yang penduduknya didominasi oleh agama Khatolik, mengalami teror-teror dan pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Moro yang bergama muslim dibagian negara Filipina Selatan selama berpuluh-puluh tahun yang ingin berusaha memisahkan diri dari Filipina. Sejak tahun 70-an, gerakan insurjensi ini dipimpin oleh *Moro National Liberation Front* (MNLF), lalu kemudian pada tahun 80-an didominasi oleh *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) yaitu pecahan dari MNLF yang lebih radikal. Kelompok teroris Abu Sayyaf kemudian muncul akibat dari perpecahan dua gerakan sebelumnya pada tahun 90-an.⁷

Diskriminasi serta kesenjangan sosial yang sangat tinggi antara kaum muslim dengan katolik yang menjadikan kelompok teroris dapat berkembang pesat di Filipina. Sebagian besar kaum muslim yang mendiami Filipina melakukan migrasi dari pulau kecil bernama Mindanao menuju Manila. Demi mendapatkan kehidupan yang lebih layak, masyarakat muslim mendesak pemerintah pusat Filipina untuk memberikan hak independen mereka sebagai umat muslim yang setara dengan masyarakat Filipina yang sebagian besar beragama Katolik. Kesenjangan sosial merupakan salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan terorisme di Filipina menjadi semakin mudah terjadi.

Semakin menjamurnya pergerakan teror dari kelompok Abu Sayyaf membuat Filipina mengalami penurunan dalam beberapa aspek seperti semakin menurunnya tingkat turis yang mengunjungi negara Filipina dikarenakan banyaknya aksi penculikan, penyanderaan, dan aksi teror lainnya yang dilakukan

⁷ Eusaquito, M. P. 2004. *The Philippine Respon to Terrorism : The Abu Sayyaf Groip*.

oleh kelompok teroris Abu Sayyaf tersebut.⁸ Hal tersebut menyebabkan Filipina merasa kewalahan dan memerlukan bantuan dari negara lain untuk memberantas kelompok teroris Abu Sayyaf, oleh karena itu Filipina mencoba untuk meminta bantuan kepada Amerika Serikat yang juga sedang gencar melakukan *war on terrorism*.

Momentum terjadinya penyerangan terhadap pusat perekonomian di Amerika Serikat yaitu pada Gedung *World Trade Center* (WTC) di New York dan Gedung Pentagon di Washington pada 11 September 2001 (9/11). Pelaku tragedi 9/11 adalah jaringan terorisme Al-Qaeda yang pernah dipimpin oleh Osama bin Laden. Serangan tersebut juga mempunyai afiliasi dengan kelompok teroris Abu Sayyaf. Dalam perkembangannya, kelompok teroris Abu Sayyaf berpotensi mengancam keamanan nasional Amerika Serikat dan Filipina maka dari itu membutuhkan penanganan dengan respons yang sama, yakni dengan menggunakan kekuatan militer dalam menghadapinya.

Filipina sendiri mengakui betapa besarnya ancaman organisasi teroris domestik dan juga teroris asing dinegaranya. Ancaman utama yang diwaspadai oleh Filipina terkait dengan teroris transnasional adalah transfer pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal melakukan teror kepada kelompok teroris domestik sehingga dapat memberikan bantuan atau memfasilitasi aktivitas teroris domestik dengan adanya bantuan dana atau kerja sama operasional diantara kelompok teror.

⁸ Chandran, Nyshka. 2017. *Terrorism Could Thwart One of the Philippines' Growth Engines*. Diakses dari <https://www.cnbc.com/2017/05/17/terrorism-could-thwart-one-of-the-philippines-growth-engines.html> pada 10 Maret 2020

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan sebelumnya, penelitian ini hanya terbatas pada ruang lingkup yang berkaitan dengan strategi keamanan domestik dan internasional Filipina dalam menangani kelompok teroris Abu Sayyaf dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut Bagaimana Strategi yang Diterapkan Filipina dalam Memberantas Kelompok Teroris Abu Sayyaf di Filipina Selatan pada Tahun 2002-2009?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan pengetahuan bagi mahasiswa/i dalam bentuk karya tulis ilmiah atau penelitian ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memenuhi gelar stata 1 dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara khusus adalah untuk menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan oleh negara Filipina dalam memberantas kelompok teroris Abu Sayyaf di wilayah Filipina Selatan, secara domestik maupun internasional. Sehingga dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman terkait bagaimana saja langkah yang diambil oleh Filipina untuk memberantas kelompok teroris Abu Sayyaf di wilayah Filipinah Selatan.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral pada dasarnya merupakan konsep yang sangat penting dalam Hubungan Internasional dan merupakan konsep yang mengutamakan sikap saling membutuhkan antara negara satu dengan lainnya. Sikap saling membutuhkan ini diutamakan dalam hal melakukan berbagai pengembangan, peningkatan, kerjasama, dan berbagai keuntungan-keuntungan timbal balik yang dimiliki oleh dua negara yang melakukan suatu kerjasama dalam berbagai aspek.

Kerjasama bilateral juga diartikan kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara tertentu. Dengan kata lain, kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dibangun oleh dua negara saja. Kerjasama bilateral tidak hanya dibangun dalam bidang ekonomi, tetapi kerjasama ini juga dibangun dalam bidang politik serta militer. Selain melakukan kerjasama bilateral, hubungan antar negara juga harus adanya suatu perjanjian internasional yang berfungsi sebagai pengatur kerjasama antar negara yang terlibat.

Jowondo menjelaskan pentingnya hubungan bilateral dikembangkan oleh bangsa-bangsa di dunia Internasional yang memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi kebijakan politik internasional yang dipelihara oleh dua negara yang melakukan hubungan bilateral dalam mengembangkan dan memajukan kedua negara tersebut sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut:⁹

⁹ Jowondo. 1991. Hubungan Bilateral: Definisi dan Teori. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 21

“hubungan bilateral merupakan hubungan interaksi antara dua negara yang dikembangkan dan dimajukan dengan menghormati hak-hak kedua negara untuk melakukan berbagai kerjasama pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan 33 bernegara tanpa mengabaikan dan mengucilkan keberadaan negara tersebut serta mewujudkan perdamaian dan memberikan nilai tambah yang menguntungkan dari hubungan bilateral ini.”

Dalam hal ini kerjasama bilateral juga melibatkan perjanjian bilateral. Yang dimaksud dengan perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat atau diadakan oleh dua negara. Biasanya perjanjian bilateral mengatur tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Artinya tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut.¹⁰

Dalam konteks penelitian ini, kerjasama bilateral digunakan untuk melihat kebijakan Filipina dalam menghadapi ancaman terorisme *Abu Sayyaf Group* yang diimplementasikan dalam kebijakan internasionalnya. Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Filipina dengan Amerika Serikat lebih fokus kepada kerjasama militer. Kerjasama militer dapat melakukan peran politis, yakni sebagai simbol kemauan untuk melebarkan ruang lingkup kerjasama, saling percaya dan komitmen untuk menta'atullah perbedaan antar negara. Kerjasama militer sebagai bentuk transparansi dalam hubungan pertahanan, menggunakan doktrin pertahanan sebagai *tool* dalam diplomasi pertahanan, sehingga negara lain membaca produk tersebut dan mengetahui arah dari pengembangan militer suatu negara.

¹⁰ Ahmad Rustandi SH dan Zul Afdi Ardian SH. 1988. Tata Negara Jilid 2. hal. 202

Negara-negara yang melakukan kerjasama bilateral dimotivasi oleh pertimbangan kepentingan nasional, diharapkan dengan melakukan kerjasama bilateral tersebut kepentingan nasional dapat tercapai. Kerjasama bilateral mengandung faktor-faktor yang merupakan pendorong terciptanya hubungan yang harmonis. Upaya suatu negara yang mengadakan kerjasama bilateral dengan negara lain di dasarkan pada pertimbangan bahwa kerjasama tersebut mendapat keuntungan yang lebih utama dalam mewujudkan pencapaian kepentingan nasional dan tujuan negara.¹¹

1.4.2 Counter Terrorism

Kata *counter-terrorism* memiliki beberapa definisi yang berbeda dari berbagai ahli terorisme. Sandler mengatakan *counter-terrorism* sebagai sebuah tindakan pemerintah untuk menghalangi serangan teroris dan mengurangi atau membatasi konsekuensi dari serangan teroris.¹² Mentan juga memiliki pendapat yang sama bahwa *counter-terrorism* adalah sebuah intervensi yang dilakukan negara dalam hal ini pemerintah untuk menanggapi tindakan terorisme.¹³ Menurut Omilicheva, *counter-terrorism* merupakan seluruh kebijakan pemerintah baik kebijakan domestik maupun kebijakan luar negeri yang dirancang untuk

¹¹ Jowondo. *Op cit.*

¹² Todd Sandler. *Collective Versus Unilateral Responses To Terrorism*. Public Choice. Vol 124. No 1/2 (Spring 2005). hal. 78. Diakses dari <http://hercules.us.es/~mbilbao/pdf/sandler.pdf> pada 09 Juni 2020

¹³ Mentan. 2004. *Dilemmas of Weak States: Africa and Transnational Terrorism in The TwentyFirst Century dalam Mustofa Cosar Unal*. New York: Routledge. hal. 4

mengekang teroris dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kekerasan teroris, memulihkan dan menegakkan ketertiban sosial dalam masyarakat.¹⁴

Lebih lanjut, ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam penanganan terhadap terorisme. Selain *counter-terrorism* ada pula istilah anti terorisme. Anti terorisme lebih merujuk pada upaya untuk mencegah atau menghalangi terjadinya serangan teroris dan upaya untuk mengurangi efek dari serangan teroris di kemudian hari. Anti terorisme dapat dikatakan sebagai tindakan *defensive*.¹⁵ Sementara kontra terorisme adalah tindakan melawan terorisme atau upaya menggagalkan tindakan terorisme. *Counter-terrorism* lebih menekankan pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah ketika telah terjadi serangan teroris. Namun pada dasarnya dalam kontra terorisme ada pula upaya *defensive* maupun *offensive*. Meminjam pendapat dari Omilicheva maka dalam hal ini tidak membedakan antara upaya anti terorisme dan kontra terorisme karena karakteristik utama dalam anti terorisme telah tercakup dalam *counter-terrorism*.¹⁶

Hewitt dan Omilicheva dalam bukunya Unal menyatakan bahwa dalam menetapkan sebuah strategi *counter-terrorism* harus terkait pada persepsi terorisme, siapa terorisme dan bagaimana karakteristiknya serta persepsi mengenai penyebab munculnya terorisme.¹⁷ Ketika pemerintah mengetahui apa yang menjadi faktor munculnya kelompok terorisme maka tindakan *counter*

¹⁴ Mariya Y. Omelicheva. 2011. *Counter-terrorism policies in Central Asia*. New York: Routledge. hal. 5

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Hewitt C, Omelicheva, M.Y. 2007. *Combating Terrorism in Central Asia: Explaining Differences in States Responses to Error*, dalam Mustofa Cosar Unal, Op.Cit., hal. 5

terrorism akan difokuskan pada upaya menghancurkan penyebab tersebut. Beberapa penyebab munculnya kelompok terorisme adalah faktor politik, ekonomi, maupun agama sehingga dibutuhkan tindakan kontra terorisme yang mencakup hal tersebut.

Kemunculan terorisme memiliki faktor yang berbeda-beda sehingga berpengaruh pada strategi dalam kontra terorisme yang tidak memiliki satu ukuran pasti di kalangan ilmuwan. Beberapa pakar terorisme memiliki model tersendiri mengenai tindakan *counter-terrorism*, bahkan setiap negara yang menghadapi ancaman terorisme memiliki kebijakan kontra terorisme yang berbeda dengan negara lain. Perbedaan ini terkait pada jangkauan, tujuan, target dari teroris dan beberapa indikator lainnya. Kebijakan *counter-terrorism* ini dapat meliputi peningkatan atau modernisasi teknologi pencegah terjadinya kejahatan, penguatan terhadap target atau berupaya memperkuat masyarakat agar tidak menjadi bagian dari teroris, peningkatan personil keamanan, memperkuat lembaga-lembaga terkait terorisme dan memberikan atau memperbaharui hukum agar sanksi yang didapatkan teroris lebih berat dan memberikan efek jera.¹⁸ Benjamin menekankan pada hal serupa bahwa dalam kontra terorisme menghadapi ancaman terorisme negara tidak hanya melakukan serangan militer akan tetapi bergantung pula pada kekuatan intelijen dan penegakan hukum.¹⁹

¹⁸ Todd Sandler, Loc.Cit

¹⁹ Daniel Benjamin. 2008. *Strategic Counter-terrorism*. Diakses dari https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/10_terrorism_benjamin.pdf pada 9 Juni 2020

Lebih lanjut, *counter-terrorism* bergantung pula pada motif dari terbentuknya suatu kelompok terorisme. Hal ini agar negara dapat meminimalisir ancaman terorisme dalam wilayah internal negara. Saat ini kelompok teroris menjadikan ideologi sebagai motif dari tindakannya. Menggunakan ideologi pula, kelompok teroris mencoba untuk melakukan rekrutmen dan mendapatkan simpati dari masyarakat. Oleh karena itu, upaya *counter-terrorism* juga dilakukan melalui perlawanan ideologi dan upaya de-radikalisasi. Rohan Gunarta menyebutkan bahwa kelompok teroris memproduksi ideologi ekstremis untuk mendapatkan kekuatan maka sudah seharusnya bagi negara untuk merespon tindakan tersebut dengan tanggapan yang menggunakan ideologis pula agar dapat memberikan kerugian sumber daya manusia bagi teroris.²⁰ Artinya bahwa setiap tindakan *counter-terrorism* yang dijelaskan sebelumnya kemudian diimplementasikan oleh suatu negara dalam kebijakan domestik dan kebijakan eksternal.

Kebijakan domestik dapat berupa analisis intelijen, kekuatan militer, penguatan hukum dan manajemen media. Sementara kebijakan eksternal dapat berupa hubungan diplomatik dengan negara lain dalam menghadapi terorisme dan inisiatif internasional atau kerjasama internasional.²¹ Lebih dari itu, kebijakan *counter-terrorism* tidak hanya melibatkan pemerintah namun melibatkan seluruh elemen negara karena teroris tidak hanya menyentuh ranah politik tetapi juga dimensi-dimensi lainnya seperti ekonomi, ideologi dan agama. *Counter-terrorism*

²⁰ Rohan Gunaratna. *Ideology in Terrorism and Counter Terrorism: Lessons from combating AlQaeda and Al Jemaah AL Islamiyah in Southeast Asia*, CSRS (Cervisal Spine Research Society). Diakses dari http://kms2.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ESDP/44015/ichaptersection_singledocument/0d07f910-03a4-4cc7-86ea-5b754a6e04fa/en/07.pdf pada 9 Juni 2020

²¹ *Ibid*

dilakukan tidak hanya dalam kebijakan publik atau domestik, namun juga dilakukan dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Hal ini karena terorisme yang dihadapi tidak hanya berasal dari lingkup domestik, tetapi memiliki lingkup yang lebih luas yakni terorisme transnasional. Sehingga diperlukan pula kerjasama dengan negara lain.

Dalam hal kerjasama luar negeri juga dijelaskan oleh Posen. Barry R. Posen menjelaskan bahwa dalam melawan terorisme maka suatu negara harus memiliki strategi yang menitikberatkan pada sumber daya negara dalam hal ini ialah uang, waktu, modal politik dan kekuatan militer.²² Sumber daya ini dapat diimplementasikan dalam beberapa kebijakan *counter-terrorism* yakni pembentukan sekutu dan kerjasama antar negara dalam melawan kejahatan terorisme transnasional. Selain itu, Posen juga menekankan pada beberapa hal lainnya yakni penyerangan infrastruktur teroris melalui sebuah operasi gabungan jika infrastruktur teroris tersebut berada dalam wilayah yurisdiksi negara lain. Selain itu ada pula penambahan jumlah personil dan alustista, teknologi yang lebih canggih, peningkatan kemampuan personil dengan melakukan latihan bersama dengan negara lain.²³

Upaya *counter-terrorism* tidak hanya memiliki satu patokan khusus akan tetapi tergantung pada ancaman teroris yang dihadapi oleh suatu negara. Dalam hal ini counter-terrorism dapat berupa penegakan hukum, perlawanan ideologi

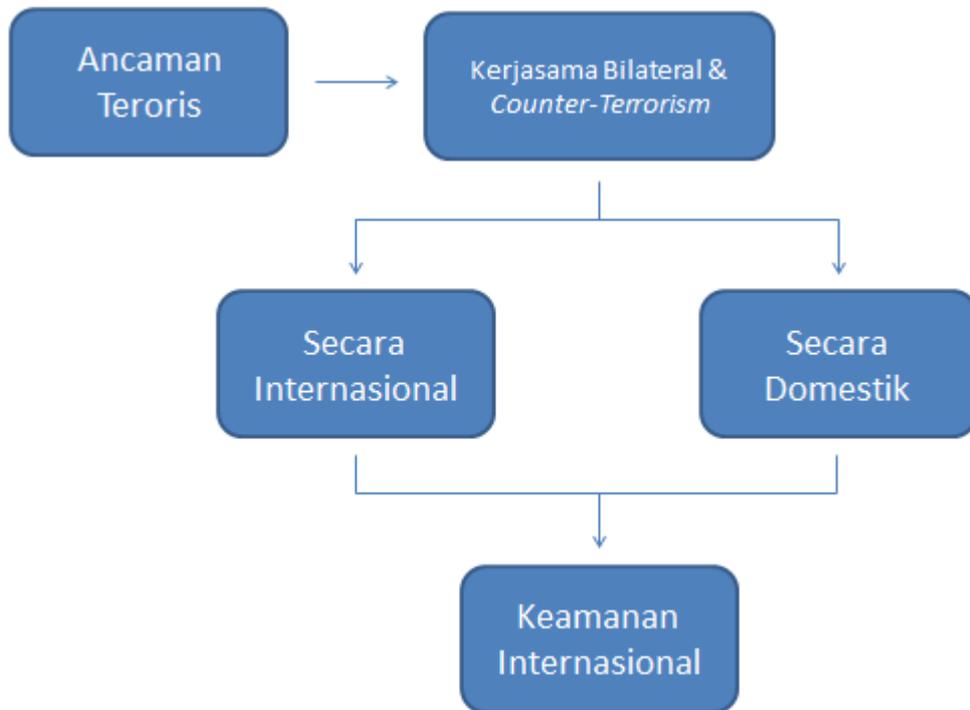
²² Barry R. Posen. 2001. *The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics*, *International Security*. Vol 26. No 3. The MIT Press Journal. hal.42. Diakses dari <http://www.comw.org/pda/14dec/fulltext/01posen.pdf> pada 10 Juni 2020

²³ *Ibid*, hal 45-47

atau de-radikalisasi, penggunaan intelijen, peningkatan personil keamanan, memperkuat lembaga-lembaga terkait terorisme, melakukan serangan militer terhadap teroris, melakukan operasi gabungan dengan negara lain, kerjasama regional maupun kerjasama internasional dalam menghadapi terorisme. Upaya-upaya tersebut kemudian terimplementasikan dalam kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri suatu negara.

Dalam konteks penelitian ini, *counter-terrorism* digunakan untuk melihat kebijakan Filipina dalam menghadapi ancaman terorisme *Abu Sayyaf Group* yang berada di wilayah Filipina Selatan. *Counter-terrorism* yang dilakukan Filipina diimplementasikan ke dalam kebijakan domestik dan kebijakan internasional yang bertujuan untuk menjaga keamanan Filipina dari ancaman *Abu Sayyaf Group* yang semakin meluas.

1.5 Sintesa Pemikiran



Adanya ancaman dari kelompok teroris yang cukup meresahkan dan mengancam keamanan nasional membuat suatu negara membentuk sebuah strategi dengan bekerjasama dengan negara lain. Dengan tujuan tercapainya keamanan nasional, suatu negara membuat strategi domestiknya untuk memperkuat keamanan nasionalnya.

1.6 Argumen Utama

Sejak tahun 1991 kelompok teroris Abu Sayyaf menguasai wilayah Filipina Selatan membuat kelompok teroris di negara Filipina menjadi menjamur dan semakin banyak. Teror-teror meresahkan yang disebabkan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf membuat pemerintah Filipina mengambil tindakan tegas. Filipina mengambil kebijakan yang harus dirubah baik secara domestik maupun internasional.

Dari segi internasional Filipina membentuk dua strategi yang cukup berani yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara Amerika Serikat. Dikarenakan Amerika Serikat juga sedang gencar melakukan *war on terrorism* setelah tragedi 9/11. Setelah Tragedi 9/11, pemerintah Amerika Serikat menerapkan inisiatifnya untuk menghadapi ancaman terorisme. Inisiatif tersebut langsung mendapat persetujuan dan dukungan sangat baik oleh pemerintahan Filipina. Kerjasama di bidang militer tersebut masih berlangsung hingga sekarang dan membuat hubungan kedua negara semakin erat, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Demikian juga dengan pertahanan dan keamanan negara Filipina yang semakin kuat dari ancaman terorisme.

Selain menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat, Filipina juga merombak kebijakan dalam negerinya. Beberapa hal yang dilakukan Filipina didalam negerinya sendiri yaitu meningkatkan teknologi pencegah terjadinya kejahatan, memperkuat ideologi masyarakat agar tidak menjadi bagian dari teroris, memperkuat lembaga terkait terorisme seperti *National Counter-Terrorism Action Group (NACTAG)* dan memperbaharui hukum agar sanksi yang didapatkan teroris memberikan efek jera.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif, artinya menggunakan satu variabel judul (x) dan memakai argumen utama sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah yang diajukan. Dilihat dari sisi eksistensi variabel, penelitian deskriptif dilakukan terhadap variabel yang data-datanya sudah ada tanpa proses

manipulasi (data masa lalu dan sekarang). Dilihat dari sisi penyampaianya, penelitian deskriptif dibuat untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam penelitian ini adalah tahun 2002 hingga 2009. Tahun 2002 dipilih berdasarkan mulai dilaksanakannya kerjasama antara Amerika Serikat dengan Filipina. Kemudian dimulai pada tahun 2007 yaitu ketika *National Counter-Terrorism Action Group (NACTAG)* terbentuk hingga tahun 2009 untuk mengetahui bagaimana perkembangan yang terjadi dalam menangani kelompok teroris Abu Sayyaf di wilayah Filipina Selatan.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara studi pustaka atau *library research*. Studi pustaka bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan atau memperkaya pengetahuan dan argumentasi peneliti terkait dengan masalah sosial atau konsep yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sumber-sumber referensi penelitian didapat melalui buku-buku, jurnal, serta sumber-sumber lain melalui internet yang merupakan dokumen tertulis. Mayoritas data-data sumber yang didapat merupakan data sekunder yang berarti informasi didalamnya didasarkan pada temuan-temuan yang dihasilkan oleh pihak lain berupa buku yang ditulis oleh para ahli maupun jurnal tentang penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Serta sumber-sumber dari internet yang telah dituliskan sebelumnya oleh peneliti terdahulu .

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif ini dipilih karena sesuai dengan pendapat Lawrence W. Neuman yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan data dengan memberi arti pada data yang diperoleh, mengubah atau membuat data-data yang tersebut, agar dapat dimengerti.²⁴

Pendekatan kualitatif disini juga dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai fenomena kelompok gerakan Islam di Filipina terutama mengenai kelompok teroris. Meskipun dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian pustaka sebagai kerangka pemikiran namun, landasan teori dalam kerangka pemikiran ini lebih dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi Hubungan Internasional ini dilakukan dalam 4 bab yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

BAB I yang merupakan Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penelitian berupa isu permasalahan yang diangkat atau gambaran fenomena awal yang selanjutnya disertai juga dengan urgensi penelitian. Selain itu, disampaikan

²⁴ Roberts, C., L., P. C. V., Neuman, W. L., & Lane, D. 2004. *Research and statistics guidebook*. Boston, MA: Pearson Custom Publishing, University of Phoenix.

pula rumusan masalah, teorisasi yang digunakan, argumen utama sebagai jawaban sementara, dan terdapat metode penelitian yang didalamnya terdapat jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data penelitian.

BAB II yang merupakan Strategi Kerjasama Filipina dengan Amerika Serikat berisi mengenai strategi yang diambil oleh Filipina dengan menggunakan strategi kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat dalam bidang militer.

BAB III yang merupakan Strategi Keamanan Domestik Filipina berisi mengenai strategi *counter-terrorism* yang diambil oleh Filipina secara domestik atau kebijakan dalam negeri.

BAB IV yang merupakan Penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang telah penulis buat.